

**PEMBANGUNAN BUDAYA MARITIM DALAM MENDUKUNG
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
(STUDI MASYARAKAT PESISIR BANTUL)**

*DEVELOPMENT OF MARITIME CULTURE IN SUPPORT OF INDONESIA AS GLOBAL
MARITIME FULCRUM STUDY ON THE COASTAL COMMUNITY OF BANTUL
REGENCY*

Letkol Laut (KH) Ridwan, S.Sos¹
Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., D.E.S.D²
Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si³

Universitas Pertahanan

(ridwan@idu.ac.id, rosseauherve@gmail.com, b.asyou@gmail.com)

Abstrak – Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas perairan lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Hal ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dimungkiri bahwa identitas Indonesia adalah negara maritim. Indonesia juga berada di posisi yang sangat strategis sebagai Sea Lanes of Communication (SLOC) serta Sea Lines of Trade (SLOT) dunia. Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia dan mulai terdegradasi sejak jaman kolonial hingga sekarang. Masyarakat Indonesia sudah meninggalkan laut, sumber daya maritim tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga Bantul, salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pantai belum menjadikan laut sebagai sumber penghidupan, sehingga nilai dan norma maritimnya masih rendah. Dalam penelitian ini kesadaran masyarakat dan kemampuan pemda Bantul harus ditingkatkan sebagai pemikiran baru tentang budaya maritim masyarakat Bantul, serta dapat memberikan solusi dan rekomendasi terhadap kalangan regulator dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksana pemanfaatan sumber daya maritim. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dipertajam dengan Soft System Methodology yang dipadukan dengan teori nilai dan norma serta budaya maritim sebagai pisau analisis utama. Software Nvivo juga digunakan dalam pengolahan data dengan melakukan koding serta pembentukan kategori dan tema. Kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta aturan/norma yang belum mendukung pemanfaatan sumber daya maritim di Bantul menjadikan budaya maritim belum tercipta.

Kata Kunci : Negara maritim, Budaya Maritim, Nilai dan Norma Maritim.

Abstract - As an archipelagic state, the waters of Indonesia are vaster compared to its land area. Thus, it is only natural to imply that Indonesia's true identity is a maritime nation. Indonesia is also in a very strategic position as Sea Lanes of Communication (SLOC) and the world Sea Lines of Trade

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Keamanan Maritim Cohort 4, saat ini bertugas di Spamal Mabes TNI AL.

² Dosen Pembimbing Pertama, Dosen Tetap di Universitas Pertahanan, Mantan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan dan saat ini bertugas sebagai Komandan Sekolah Staf Dan Komando TNI AL (Seskoal).

³ Dosen Pembimbing Kedua, Dosen Tetap di Universitas Pertahanan, Peneliti Pada Pusat Studi Keamanan Maritim Unhan.

(SLOT). Its glory as a maritime state was evident in its long history; nevertheless largely degraded since colonialism until today. For long Indonesians have turned their back from the sea, hardly utilize existing maritime resources, and therefore the maritime has yet to contribute significantly to the prosperity of the people. These also apply in Bantul, one of Indonesia's regencies blessed with coastal lines, yet the sea has not become the people's source of living; thus scarce maritime norms and values. This study found the need to bolster the people's awareness as well as the local government's capacity as a new thinking on Bantul's maritime culture, providing solution and recommendation to the policy makers as well as operators. The study uses qualitative method, supported by Soft System Methodology. Theories on norms and values were applied for the study's analysis process. The Nvivo software was used for data processing through coding and development of categories and themes. The lack of quality and range of human resources, facilities and infrastructure as well as rules / norms that have not supported the use of resources in Bantul has not yet created maritime culture.

Keywords: Maritime State, Maritime Culture, Maritime Norms and Values

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.500 pulau.⁴ Hal ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa identitas Indonesia adalah negara maritim. Letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia berada di posisi strategis yang mendatangkan manfaat, keuntungan dan sekaligus potensi ancaman.

Perairan Indonesia yang menjadi jalur komunikasi (*Sea Lanes of Communication / SLOC*) dan jalur perdagangan (*Sea Lanes of Trade / SLOT*)

merupakan perlintasan bagi ribuan kapal dagang dengan nilai ekonomi mencapai USD 13.000 trilyun per tahun. Selain itu 4 (empat) dari 9 (sembilan) *choke point* dunia yang berada di Indonesia juga menjadi perlintasan berbagai jenis kapal militer dari berbagai negara sehingga menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis pada bidang pertahanan.



Gambar 1 SLOC/SLOT di Indonesia
Sumber: Sridewikuntarti, 2015

⁴ Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, 2017. Jumlah Terbaru Pulau Milik Indonesia Versi Survei Pushidros TNI AL dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/2994344/jumlah-terbaru-pulau-milik-indonesia-versi-survei-pushidrosal>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.00.

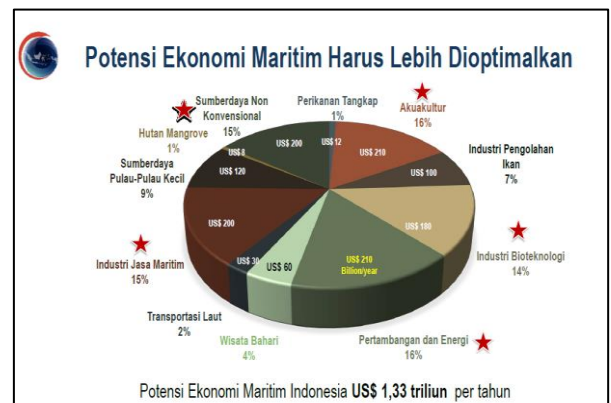
Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) oleh dunia internasional yang dideklarasikan pada tahun 1982 dalam

konvensi hukum laut PBB ke-III tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*) memberikan Indonesia Kedaulatan dan hak berdaulat yang cukup besar di laut hingga mencapai luas $\pm 5.877.879 \text{ km}^2$ ⁵ untuk mengelola kekayaan alamnya yang berada di kolom laut, permukaan laut, dasar laut dan tanah dibawahnya. Bahkan untuk potensi kekayaan alam di bawah dasar laut, Indonesia dapat mengelola dan memanfaatkan bidang tanah bawah dasar laut hingga jarak sejauh 350 NM (*nautical mile*) dengan memanfaatkan rejim Landas Kontinen (*continental shelf*) yang diakui dan diatur oleh UNCLOS 1982.

Sumber daya kelautan yang *multydiversity* dan luar biasa besar, produk dan industri jasa maritim yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi wisata bahari akan menjadi sumber pendapatan negara yang melimpah jika dikelola dengan baik dan benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai Rp 7.200 triliun per tahun

⁵ Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia : *Application of Geographic Information System for Assessment of Indonesia Marine Proportion*, (Jakarta : Badan Informasi Geospasial, 2013), hal. 18.

setara dengan enam kali lipat APBN tahun 2011 (Rp.1.299 triliun) dan satu setengah kali PDB tahun 2015 (Rp 5000 triliun) dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih dari 30 juta orang.⁶



Gambar 2 Potensi Ekonomi Maritim Indonesia

Sumber: Kemenko Maritim, 2016

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis memberi peluang dan potensi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, makmur, aman dan sejahtera bahkan bisa menjadi negara *superpower* dunia jika luas laut yang dimiliki, sumber kekayaan alam yang ada dan letak strategis dikelola dengan baik dan benar. Namun kenyataannya sektor kelautan masih di posisi sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) yang diindikasikan dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya

⁶ Limbong, Poros Maritim, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta : PT Dharma Karya Karsa Utama, 2015) hal. 54

kelautan, penerapan teknologi dalam pemanfaatan laut, selain itu hampir meratanya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat kelautan khususnya nelayan.

Data sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa dari 237.566.363 penduduk Indonesia hanya 2.313.006 orang yang berprofesi di bidang maritim. Kualitas dan kuantitas sumber daya maritim mempunyai pengetahuan dan menguasai teknologi masih jauh dari cukup, rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan oleh nelayan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan terluar mengindikasikan kurangnya kesungguhan bangsa Indonesia menjadikan laut sebagai hari depan bangsa, begitu juga pariwisata maritim belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.

Fakta sejarah menceritakan bahwa Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai pendukung utama kepentingannya. Kerajaan Sriwijaya (Abad VII-XIII) menguasai lalu lintas perdagangan laut antara India dan Cina dan sudah mewajibkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan yang berada di

bawah otoritas Sriwijaya. Kerajaan Majapahit (Abad XIII-XV) mencapai masa kejayaannya abad ke-14, dibawah kepemimpinan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada⁷ yang menerapkan politik ekspansi meliputi wilayah Indocina sampai India yang didukung armada laut yang kuat. Samudera Pasai (Abad XV-XVI) juga menunjukkan kejayaannya di laut dengan kemampuan angkatan laut yang dimiliki sanggup memberikan perlawanan kepada bangsa-bangsa kolonial eropa yang ingin menguasai Selat Malaka.⁸

Sejak zaman Kolonial (Abad XVI-XX) di sinilah awal mulai degradasi kemaritiman di Indonesia. pada tahun 1670 VOC kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa dikuasai dan dikontrol oleh mereka dan akhir abad ke-17 hampir semua pelabuhan di Nusantara dikuasai oleh kolonial Eropa diantaranya Belanda, Portugis, Inggris dan Spanyol. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bercocok tanam, hingga indonesia akhirnya bertransformasi menjadi negara agraris. tetapi ada segi positifnya yang didapat dari Kolonial

⁷ O. W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & Perniagaan Dunia Abad III - Abad I*, (Jakarta : Komunitas Bambu. 2011), hal. 37

⁸ A. Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 83

Belanda yaitu *transfer of technology* terutama teknologi perkapalan. Dari data yang ada sudah sewajarnya kita memandang laut sebagai sumber kesejahteraan yang harus kita manfaatkan dan dikelola dengan baik serta harus kita jaga keamanannya.

Ide Indonesia menjadi negara maritim diawali dari visi pemerintahan Joko Widodo yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dengan 7 misi, diantaranya misi no.3 yaitu “Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan misi no.6 mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan program prioritasnya yaitu Nawacita.

Untuk memperkuat tujuan Indonesia sebagai negara maritim maka dibuatlah Visi Poros Maritim Dunia dan disampaikan oleh presiden Joko Widodo ke dunia internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Sebagai visi pemerintahan, dengan menjadikan sektor maritim sebagai faktor utama, panduan, atau penentu, sekaligus tujuan pembangunan kabinet

kerjanya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD maka dibuatlah lima pilar utama yaitu: Membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melaksanakan diplomasi maritim; dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Berdasarkan uraian di atas pudarnya budaya maritim bangsa Indonesia menjadi pokok permasalahan pudarnya kesadaran bangsa Indonesia untuk memanfaatkan laut dan mengelola sumber daya maritim secara serius, baik dan benar. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁹ Budaya maritim adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang berkiblat kepada laut/air/maritim. Budaya maritim merupakan pilar pertama dan merupakan pondasi bagi pilar-pilar lainnya. Budaya maritim merupakan identitas dari bangsa

⁹ Steward L. Tubbs, *Human Communications : Konteks-konteks Komunikasi - Buku Kedua*, (Bandung : Rosdakarya, 2001), hal. 55

Indonesia di mana laut dapat memberi kebanggaan semangat dan jiwa maritim untuk mengelola, mengolah, mengamankan dan melestarikan laut yang kaya menjadi ruang hidup dan ruang juang rakyat Indonesia demi kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya.

Undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditindaklanjuti dengan Program pengembangan wilayah pesisir di daerah. Untuk mendukung kebijakan PMD, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X dengan Visi dan Misinya menjadikan Pantai Selatan Yogyakarta sebagai halaman depan DIY sehingga wilayah selatan Yogyakarta yang secara langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia akan menjadi fokus Pemerintah DIY kedepan sebagai upaya menselaraskan kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada pembangunan sektor maritim.

Pemerintah Kabupaten Bantul yang terletak di Selatan DIY, menjadi bagian dari fokus pembangunan kemaritiman Pemerintah DIY. Kabupaten Bantul adalah suatu kabupaten di bawah provinsi Yogyakarta dengan garis pantai sekitar 17 KM dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki

potensi sumber daya perikanan dan keindahan alamnya, serta budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Oleh karena itu untuk mendukung Yogyakarta Selatan sebagai etalase DIY Pemda Bantul mengeluarkan Perda nomor 04 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bantul tahun 2010–2030, wilayah selatan Bantul diperuntukkan wilayah pertanian dan ekowisata. Pariwisata di pesisir selatan Bantul terutama pantainya menjadi tujuan utama pembangunan sektor maritim dalam mendukung PMD.

Beberapa fokus Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pembangunan bidang maritim meliputi beberapa aspek: (1) keterpaduan tata ruang daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan dengan pilar program kawasan lindung, konservasi dan pemanfaatan, (2) pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pada sumber daya alam dan berbasis masyarakat, dan (3) pembentukan kelembagaan yang kuat.¹⁰

Masyarakat Bantul juga merupakan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan keraton Yogyakarta yang sangat memegang teguh budaya

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Bantul, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul 2016-2021, (Bantul : BAPPEDA Kab. Bantul, 2017), hal. 47

sedekah laut (labuhan), tetapi budaya sedekah laut yang dilakukan oleh keraton tidak menunjukkan bahwa mereka sebagai masyarakat pelaut tetapi cenderung membuat masyarakat pesisirnya takut untuk pergi ke laut, hal ini diduga pengaruh propaganda kolonial Belanda dalam mendegradasi jiwa maritim bangsa Indonesia dengan mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa laut selatan yang jahat dengan sering meminta tumbal manusia, yang sangat berbeda dengan kabupaten tetangganya yaitu Cilacap yang mempunyai tradisi melaut yang cukup kuat.

Nilai-nilai kemaritiman pada masyarakat pesisir Bantul harus ditransformasi dari persepsi laut sebagai sesuatu yang menakutkan menjadi laut sebagai sumber daya, sumber kesejahteraan, penguasa laut (Tuhan) merupakan sosok yang baik pemberi rezeki, keselamatan dan keindahan alam. Dengan demikian budaya maritim pada masyarakat pesisir Bantul yang sempat terdegradasi, akan direvitalisasi atau bahkan di rekonstruksi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer

dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan melalui kunjungan kepada subyek-subyek penelitian dan bertemu dengan informan. Wawancara kepada informan adalah dengan teknik *in-depth interview*. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan keterkaitan instrumen-instrumen maritim terhadap budaya maritim masyarakat Bantul baik dari pemerintah maupun masyarakatnya secara langsung, diantaranya Bappeda Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan Bantul, Dinas Pariwisata Bantul, SMKN 1 Sanden, Dinas Lingkungan Hidup, Posal Samas, dan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya maritim yang ada di Bantul.

Soft System Methodology (SSM) digunakan untuk menemukan perbandingan antara sistem berpikir dan dunia nyata untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi rekomendasi permasalahan secara lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus menemukan saran yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

Terdapat tujuh langkah SSM yang telah diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu:

- Langkah 1 : Situasi Permasalahan

Langkah pertama dalam SSM adalah memetakan informasi dan pandangan yang berhubungan dengan masalah. Penelitian ini membuat gambaran secara keseluruhan dari permasalahan dan penelitian secara dasar (*basic research*) dilakukan dengan melalui buku, jurnal, media cetak, media internet, maupun sumber-sumber sekunder lainnya.

- Langkah 2: Gambaran Situasi

Langkah ini berfungsi untuk menangkap fakta-fakta dari permasalahan yang akan diangkat. Gambaran situasi dalam SSM dilakukan melalui Analisa Satu yaitu aspek intervensi, Analisa Dua yaitu aspek sosial, Analisa Tiga yaitu aspek politik, dan *Rich Picture* yang berisi pendapat penting dari seluruh informan mengenai permasalahan.

- Langkah 3: *Root Definition*

Root Definition (RD) adalah sebuah formulasi definisi dari proses transformasi untuk mencapai intervensi yang diinginkan (Lester, 2008). Penelitian ini merumuskan

tiga RD yang berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian tentang elemen sinergi, sesuai dengan fakta-fakta dalam Analisa Satu hingga Tiga dan *Rich Picture*. Tiga RD tersebut diuji dengan analisis *Costumer, Actors, Transformation Process, Worldview (Perspective), Owner, Environmental/External Factors* (CATWOE) dan analisis *3E Criteria (Efficacy, Efficiency, Effectiveness)*.

- Langkah 4: Model Konseptual

Model konseptual dalam penelitian ini dikembangkan dari ketiga RD dalam sistem berpikir, yang merupakan sistem *human activity* berisi langkah-langkah yang ideal untuk mewujudkan RD.

- Langkah 5: Perbandingan

Perbandingan dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan antara model yang telah dibuat dengan keadaan sebenarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang belum ditempuh oleh owners, perbedaan antara model ideal dengan dunia nyata disebut rentang (*gap*). Rentang yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan.

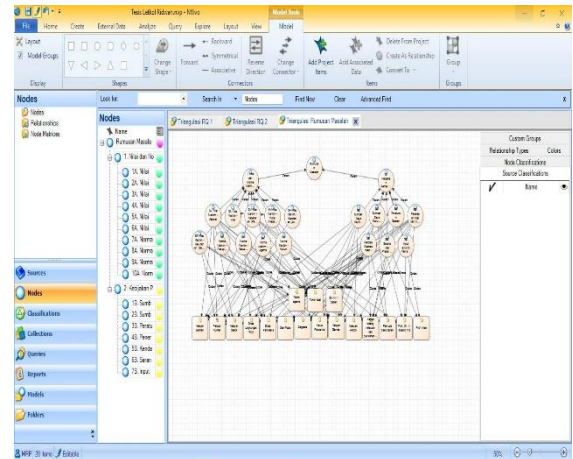
- Langkah 6: Penyempurnaan

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan terhadap rentang yang ditemukan dalam langkah perbandingan menggunakan teori dan didukung dengan hasil analisa data.

- Langkah 7: Aksi untuk Memperbaiki Masalah

Langkah terakhir dilakukan dengan menyatakan perubahan-perubahan (transformasi) mana yang dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah.

Penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi NVivo sebagai alat untuk melakukan proses pengkodean, pencarian kode, penemuan kategori, triangulasi data, dan untuk menghasilkan pengujian validitas melalui konsistensi data. Hierarki kode dalam NVivo menggunakan *parent nodes* dan *child nodes* untuk menunjukkan kategori atau fokus pembahasan dari penelitian. Model relasi juga dihasilkan menggunakan NVivo, yaitu untuk melihat hubungan antara kode atau *nodes* dan sumber data.



Gambar 3. Aplikasi NVivo Dalam Triangulasi Rumusan Masalah Terhadap Informan
Sumber : Bandur, 2016

Pembahasan

Meningkatkan Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Pesisir Bantul

Dalam konteks penelitian ini, model konseptual yang dibangun adalah mengarahkan agar budaya maritim yang pernah berkembang dan hidup pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pesisir Bantul pada masa lalu dapat direkonstruksi kembali agar dapat menjadi faktor pendorong peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi maupun aspek kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir Bantul terhadap potensi sumber daya alam maritim di daerah Bantul agar dapat dioptimalkan pengelolaannya. Selain itu meningkatkan fungsi Pemda

Bantul untuk memperkuat budaya maritim di masyarakat pesisir Bantul.

Kondisi masyarakat pesisir Bantul saat ini jika dilihat dari perspektif sosio-ekonomi terjadi trend perubahan dari masyarakat agraris (petani) ke masyarakat maritim (nelayan, wisata bahari), meski kecenderungannya masih kecil. Pelambatan proses transformasi ini terjadi karena budaya maritim belum terinternalisasi secara utuh di masyarakat pesisir bantul. Keenganan masyarakat untuk melaut ke area yang lebih jauh dari pantai dan membutuhkan durasi waktu layar lebih lama dapat dijadikan indikator untuk melihat fenomena ini.

Adanya perbedaan (*gap*) antara model konseptual yang dibangun dengan kenyataan yang faktual di tengah masyarakat menimbulkan permasalahan yang dalam konoteks penelitian ini disebut dengan permasalahan problematis, yang diupayakan untuk dicarikan solusinya.

Berdasarkan analisis menggunakan tahapan-tahapan pada *soft system methodology (SSM)*, peningkatan kesadaran maritim masyarakat pesisir Bantul dalam pemanfaatan sumberdaya maritim yang dimiliki dan peningkatan fungsi Pemda Bantul untuk memperkuat

budaya maritim pada masyarakat pesisir Bantul diharapkan dapat mengokohkan kembali Budaya Maritim masyarakat Bantul sehingga hal ini dapat mendorong kesuksesan Program Poros Maritim Dunia Pemerintah Pusat.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat saat ini yang disampaikan pada bagian berikut ini merupakan *gap* untuk membangun budaya maritim di masyarakat sehingga dibutuhkan peran pemerintah melalui peningkatan fungsi Pemda Bantul.

Peningkatan kesadaran budaya maritim pada masyarakat diwujudkan dengan penguatan nilai-nilai¹¹ dan norma serta pemahaman-pemahaman yang berkembang di masyarakat seperti yang diulas pada bagian setelah ini.

Nilai material yaitu nilai yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara jasmani. Kesadaran masyarakat pesisir Bantul bahwa laut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani dengan memanfaatkan sumber daya maritim, yaitu; dengan mencari ikan di laut dan pariwisata maritim. Secara umum aktivitas nelayan di pesisir Kabupaten Bantul banyak dipengaruhi oleh aktivitas nelayan asal Cilacap yang

¹¹ Nurseno, *Soiologi* 2, (Solo : PT. Tiga serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 72

datang di pesisir Bantul dengan membawa hasil tangkapan yang banyak¹² sehingga mempengaruhi warga masyarakat pesisir Bantul untuk beralih profesi dari petani menjadi nelayan. Hal ini mendorong para petani atau nelayan ikut pergi melaut. dan mengesampingkan mitos bahwa di laut terdapat penguasa laut yang sering meminta korban di mana selama ini menjadi penghalang bagi mereka untuk pergi mencari ikan di laut. Mitos bahwa laut penuh dengan hal menakutkan berubah menjadi sumber penghidupan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) yang bertugas dan berfungsi untuk melakukan pembinaan nelayan mengalami kesulitan untuk mendorong masyarakat pesisir bertransformasi menjadi masyarakat maritim. Faktor pandangan awam masyarakat untuk selalu berkumpul dengan keluarga dan tetangga menjadikan mereka enggan untuk pergi melaut yang membutuhkan 5-7 hari waktu layar. Inilah yang mendasari mengapa nelayan lebih memilih untuk tetap menjadi nelayan harian saja. Faktor penguasaan teknologi yang masih rendah dan pengetahuan

juga memperparah kondisi masyarakat pesisir jauh dengan laut secara kultural. Fasilitas labuh dan tambat kapal yang sangat minim juga menjadi hambatan lainnya.

Pariwisata maritim yang merupakan salah satu sektor penghasil devisa utama juga bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Namun kondisi masyarakat pesisir Bantul yang tidak memiliki keahlian pengelolaan pariwisata maritim, sehingga mereka hanya sebagai pedagang makanan maupun souvenir, penjaga parkir, pemandu wisata, penyewaan motor ATP, penyewaan tikar maupun perahu layar di laguna.¹³ Pengelolaan pariwisata yang ada di Bantul diserahkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaannya belum optimal. Sektor pariwisata maritim Bantul masih standar kelayakan minimal daerah tujuan wisata, diantaranya :

- 1) Objeknya yaitu pantai dan budaya sedekah laut.
- 2) Akses jalan sudah ada sampai langsung ke lokasi bahkan sekarang sudah dibuat jalan nasional jalur selatan dan sedang dibuat lapangan terbang di Kulon Progo.

¹² Wawancara dengan Sadino, Tokoh Adat dan Ketua Pokwasnas Samas , 15 November 2017

¹³ Wawancara dengan Oki Setiawan, Ketua Kelompok Sadar wisata (Pokdarwis) Bantul, 17 November 2017

- 3) Akomodasi ada sekitar 229 penginapan.
- 4) Fasilitas kesehatan, ibadah, pembuangan sampah, kamar mandi.
- 5) Transportasi bis, kendaraan umum.
- 6) Carering service yaitu restoran maupun warung makan, tempat pembelanjaan souvenir.
- 7) Aktivitas rekreasi seperti kolam renang, tempat permainan anak-anak, voli pantai, moda wisata transportasi andong, wisata rally mobil dan sepeda motor mini, wisata terbang layang, festival layang-layang, olah raga voli, parade band, berlayar di laguna, motor ATV (All terrain vehicle) dan masih banyak lagi.
- 8) Keamanan adanya penjaga pantai dan SAR laut.

Permasalahan di atas dapat dikatakan faktor penyebabnya diantaranya sumber daya manusia masih kurang kemampuan dan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber daya maritim, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta fasilitas modal untuk mengembangkan usaha di sektor maritim.

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang maritim diduga berkaitan dengan sistem pendidikan kita selama ini. Sekolah-sekolah yang mampu

menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya maritim sangat mendesak dibutuhkan. Penyiapan sumber daya manusia di Bantul dalam pemanfaatan sumber daya maritim memiliki sekolah tingkat kejuruan pariwisata maupun kelautan. SMKN 1 Sanden di bawah pembinaan pemda provinsi sudah memiliki sertifikasi Internasional kelautan dan perikanan mendidik siswanya untuk siap kerja di bidang kelautan dan perikanan. Pada kenyataannya Pemda bantul belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga sektor maritim tidak menjadi cita-cita mereka untuk bekerja, mereka lebih tertarik menjadi TNI dan walaupun harus bekerja di sektor kelautan dan perikanan mereka tidak ingin bekerja di Bantul karena sarana dan prasarannya masih minim sehingga belum menjanjikan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan terutama teknis penangkapan ikan dengan menggunakan jaring serta penyuluhan agar ikan kecil-kecil tidak ditangkap karena zona 1a dan 1b (sekitar 4 mil) dari garis pantai Bantul sudah over fishing sehingga ikan mulai

susah didapat walaupun pada saat musim ikan.

Peningkatan kesadaran material pada masyarakat pesisir Bantul juga diimbangi dengan peningkatan kesadaran nilai rohani seperti nilai ketuhanan, keindahan (rasa), kebenaran, kebaikan dan vital. Bentuk nilai ketuhanan yang ada di masyarakat, yaitu; tradisi labuhan atau larungan yang dilakukan dalam rangka wujud syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki lewat laut dan memberikan keselamatan di dalam mencari ikan di laut. Peningkatan nilai ketuhanan masyarakat pesisir Bantul dilakukan dengan meluruskan cara pandang masyarakat bahwa Penguasa Laut¹⁴ yang selalu meminta korban justru memberikan rezeki lewat laut berupa ikan dan tempat pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Bantul.

Peningkatan nilai keindahan (rasa) dengan menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan pantai, melestarikan dan menjaga habitat fauna laut dan menjaga hutan-hutan mangrove. Di pesisir Bantul terdapat penyu yang merupakan salah

satu dari 7 jenis penyu¹⁵ yang masih bertahan hidup di dunia. Nelayan di sekitar pantai Patihan mulai melakukan pelestarian terhadap penyu dan habitatnya. Meningkatkan nilai keindahan juga dilakukan dengan mengelola penanganan sampah yaitu dengan memisahkan antara sampah organik dengan sampah non organik, penanaman dan pelestarian pohon mangrove di pantai Baros serta pelestarian pohon cemara di pantai Patihan yang terkenal dengan pantai Goa Cemara memiliki kekhasan dengan adanya pepohonan cemara yang rimbun di sepanjang garis pantai sekitar 1,4 km di mana berguna juga sebagai pencegah abrasi. Pemda Bantul dalam rangka meningkatkan nilai rasa/keindahan terhadap laut masyarakat pesisir Bantul dilakukan dengan program cinta dan peduli laut serta event-event yang mengundang masyarakat datang ke laut dan yang lebih utama penanaman nilai maritim kepada masyarakat (diharapkan penanaman nilai maritim sejak usia dini).

Peningkatan nilai kebenaran dilakukan dengan memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa di

¹⁴ Wawancara dengan Sadino, Tokoh Adat dan Ketua Pokwasnas Samas, 15 November 2017

¹⁵ Budjantoro dan Wijayanti, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ekowisata Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Patihan Gadingsari Sanden Bantul. Jurnal Riset Daerah, 2013, hal. 19

laut terdapat sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, maka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolanya. Pengetahuan yang sudah tertanam dalam diri nelayan sangat sulit untuk dikembangkan, seperti yang terjadi di nelayan Bantul dengan pengetahuan dalam melaut dengan menggunakan perahu mesin tempel sangat sulit untuk dirubah kepada kapal yang lebih besar dengan teknologi yang lebih canggih.

Nilai kebaikan yang ada di masyarakat pesisir Bantul juga terus dijaga disamping terus ditingkatkan. Nilai gotong royong yang tercermin dari aktivitas melabuhkan kapal dimana ada kelompok yang berperan sebagai “pendorong kapal” ketika kapal akan melaut selain dari kelompok nelayan yang pergi melaut, begitu pula ketika melakukan pembagian hasil melaut. Silaturahmi antar sesama nelayan dan penghormatan kepada orang tua, tokoh adat dan tokoh agama merupakan nilai-nilai kebaikan yang masih terus berkembang di pesisir Bantul.

Peningkatan kesadaran vital merupakan hal yang sangat penting diantara nilai-nilai lainnya. Nilai vital yaitu nilai yang bermanfaat bagi manusia pada saat melakukan aktivitas, oleh

karena itu laut bisa dikatakan nilai vital bagi masyarakat jika mereka sedang mencari ikan di laut atau seseorang yang sedang memanfaatkan sumber daya laut lainnya. Bagi nelayan dengan mata pencaharian melaut untuk mencari ikan tentu laut merupakan nilai vital, tetapi nelayan yang ada di masyarakat Bantul kebanyakan bukan nelayan penuh tetapi nelayan sampingan utama maupun nelayan sampingan tambahan. Hal ini biasanya mereka merangkap menjadi petani, beternak, pedagang atau penjual jasa di lokasi wisata. Laut bisa dijadikan nilai vital bagi masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan kemampuannya agar hasil dari tangkapannya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masyarakat pesisir Bantul sangat tergantung kepada laut dan budaya maritim terbentuk. Sumber daya maritim belum menjadi nilai vital bagi masyarakat pesisir Bantul karena masyarakat pesisir Bantul belum sepenuhnya tergantung kepada sumber daya maritim dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatkan kesadaran nilai vital, sumber daya maritim harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat sehingga sumber

daya maritim menjadi vital bagi masyarakat.

Disamping norma ketuhanan, juga penting untuk membangun budaya maritim bagi masyarakat pesisir Bantul. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Norma kesopanan yang ada di masyarakat Bantul sebagai masyarakat timur masih memegang teguh nilai kesopanan cara berpakaian terutama di pantai jangan sekali-kali memakai pakaian yang minim seperti bikini, dan tidak berkata-kata kotor. Norma kesusilaan melengkapi norma kesopanan. Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia.

Norma agama akan melengkapi keberadaan norma kesopanan dan kesusilaan. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Sedekah laut juga merupakan identitas dari masyarakat yang ada di pesisir pantai dalam rangka

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan rezeki yang didapat dari laut, walaupun di beberapa tempat di Indonesia sudah jarang dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan norma agama. Beberapa ulama menganggap bahwa kegiatan labuhan dianggap bid'ah bahkan mendekati syirik. Situasi seperti ini tentu diperlukan kebijaksanaan para tokoh agama untuk melihat dari sudut pandang lain yang positif sehingga bisa menselaraskan budaya dan agama. Tokoh agama Bantul mendukung kegiatan sedekah laut ini. Yang terpenting adalah niat berdoa untuk meminta rezeki kepada Tuhan (Allah) bukan kepada yang lainnya.¹⁶

Setelah norma agama dapat terjaga, maka pelaksanaan norma hukum juga dibutuhkan untuk menjaga ketertiban sesama masyarakat. Di pantai Baros terdapat hutan mangrove dan hutan cemara yang berfungsi untuk menjaga abrasi pantai tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menebang pohon tersebut di mana lahannya untuk dijadikan tambak.¹⁷ Meningkatkan kesadaran hukum

¹⁶ Wawancara dengan Saridjan, Tokoh Agama Samas, 17 November 2017

¹⁷ Wawancara dengan Mujahid, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 18 November 2017

masyarakat Bantul adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar pelaksanaan aktivitas sehari-hari sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penebangan pohon dan tanaman yang dilindungi secara hukum merupakan pelanggaran hukum sehingga dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi hukum kepada pelakunya.

Norma kebiasaan juga penting untuk dijaga karena bagian dari budaya itu sendiri. Beberapa kebiasaan yang berlangsung di masyarakat Bantul dan sudah menjadi sebuah norma adalah pola bagi hasil melaut yang dilakukan dengan cara ; pendapatan melaut dipotong dengan biaya operasional menjadi pendapatan bersih. Pendapatan bersih dipotong 7% untuk pendorong, 2% retribusi pemda Bantul dan 3% untuk Kas TPI. Hasil bersih 88% masih dibagi dua antara nelayan dan pemilik perahu. Rasa percaya, tidak saling mencurigai dan berbuat curang merupakan norma kebiasaan lainnya yang bersanding dengan kebiasaan pola bagi hasil melaut.

Norma, nilai dan upaya peningkatan yang diilustrasikan diatas merupakan kenyataan yang berhasil diidentifikasi dan diinventarisir yang ada di masyarakat pesisir Bantul. Dibutuhkan

upaya peningkatan terhadap setiap aspeknya agar budaya maritim dapat dibangun kembali. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran dan peningkatan fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul Dalam Memperkuat Budaya Masyarakat Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki peran dan tanggungjawab yang cukup besar untuk membangun kembali budaya maritim di Bantul sesuai dengan visi pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperkuat kesadaran budaya maritim yang diwujudkan dengan mendukung berbagai upaya yang dalam peningkatan kesadaran maritim masyarakat seperti yang sudah disampaikan pada bagian terdahulu analisis ini. Untuk Kemampuan meningkatkan nilai material Pemda Bantul dapat merestrukturisasi SKPD bidang maritim terutama sektor perikanan dan kelautan yang telah dilebur sebelumnya kedalam Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan sesuai dengan peraturan bupati bantul no. 115

tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan.¹⁸ Dengan dileburnya kedua dinas ini tentu berdampak terhadap program dan anggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maritim sektor perikanan. Dampak yang paling dirasakan oleh nelayan dari peleburan tersebut adalah semakin berkurangnya program-program peningkatan kesejahteraan nelayan. Permasalahan anggaran juga menjadi kendala dalam pembangunan budaya maritim karena sektor maritim tidak menjadi prioritas pembangunan di Bantul terutama untuk mendukung sarana dan prasarana di sektor perikanan tangkap seperti fasilitas dermaga tempat tambat kepelabuhan sehingga kapal-kapal besar dapat hadir di Bantul dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangkap ikan. Sumber daya manusia aparatur Pemda Bantul di sektor maritim masih minim dan tidak kompeten karena karena tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Anggaran yang dimiliki oleh Pemda Bantul yang dialokasikan untuk pembangunan sektor

maritim sangat terbatas sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Bank atau pihak swasta. Upaya yang dilakukan Pemda Bantul untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan alokasi anggaran yang lebih memadai, membentuk SKPD bidang maritim, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemda Bantul dibidang kemaritiman dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi ataupun swasta.

Untuk peningkatan nilai rohani ketuhanan berbagai upaya dilakukan seperti pembinaan nilai-nilai ketuhanan pada momen Sedekah Laut, Pemda Bantul selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta memfasilitasi dalam kegiatan keagamaan sedekah laut yang keudian diorientasikan menjadi event pariwisata daripada keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan tokoh agama yang secara bijak memberikan pemahaman dan pengarahan terkait dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan acara tersebut.

Peningkatan nilai keindahan oleh Pemda Bantul dilakukan dengan meningkatkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata dengan memperbanyak

¹⁸ Wawancara dengan Istriyani, M.sc., Kabid Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan Kab. Bantul, 16 November 2017

event-event dan meningkatkan kualitas objek wisata yang berbeda dengan objek wisata maritim di wilayah lain, memperbaiki sarana prasarana, fasilitas dan akses menuju destinasi wisata, bekerjasama dengan Pos AL Samas dan siswa Saka Bahari dalam penyelenggaraan event-event kemaritiman, menjaga kebersihan objek wisata, melestarikan fauna yang dilindungi seperti penyu, merehabilitasi hutan mangrove dan cemara. Kemampuan pemda Bantul untuk meningkatkan nilai keindahan (rasa) diperlukan anggaran yang cukup, SKPD yang khusus menangani bidang maritim, sumber daya manusia aparat pemda Bantul yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang maritim dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi atau swasta dalam pelaksanaannya.

Peningkatan nilai-nilai kebenaran dilakukan oleh Pemda Bantul dengan melaksanakan penelitian bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada tentang proses terjadinya gumukan pasir yang ada di pesisir pantai yang berguna untuk mencegah terjadinya erosi akibat ombak yang terjadi di pesisir pantai selatan Bantul. Dari hasil penelitian ternyata gumukan pasir dibawa dari pasir sungai

yang mengalir ke laut menimbulkan gumukan pasir, kenyataannya sekarang banyak eksplorasi pasir di sungai secara ilegal sehingga gumukan pasir makin lama makin berkurang. Gumukan pasir selain sebagai pencegah erosi juga sebagai tempat untuk wisata di mana digunakan oleh wisatawan sebagai tempat permainan seluncur. Pada tahun 2010 penelitian oleh pemda Bantul juga bekerjasama dengan LAPAN dan Kemenristek mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya di pantai Pandansimo walaupun sampai saat ini proyek tersebut masih terbengkalai, tetapi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angin yang kuat di pesisir pantai Bantul dapat dimanfaatkan menjadi listrik.

Peningkatan nilai kebaikan dengan ikut serta membina dan mendukung setiap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya maritim diantaranya budaya gotong royong dalam proses berangkat layar dan berlabuh, pada proses sedekah laut dan budaya silaturahmi dengan upaya pembinaan dan pelestarian bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama maupun tokoh pemuda.

Peningkatan nilai vital dilakukan dengan menanamkan kepada masyarakat bahwa laut sebagai kebutuhan vital, di mana tanpa laut mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk meningkatkan nilai vital pemda Bantul harus mampu meningkatkan sumber daya maritim untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani sehingga masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya maritimnya. Meningkatkan tugas pemda Bantul dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya maritim baik aturan yang tidak tertulis maupun tertulis dalam bentuk norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, diantaranya :

Norma kesopanan seperti cara berpakaian terutama di pantai jangan sekali-kali memakai pakaian yang minim seperti bikini, dan tidak berkata-kata kotor dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama agar norma yang sudah baik ini dapat dirasakan oleh generasi penerus. Norma kesusilaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Bantul seperti ritual sedekah laut merupakan

bentuk penghormatan terhadap orang-orang tua terdahulu, menghormati tokoh adat dan tokoh agamanya, dengan menggandeng tokoh-tokoh agama dan adat setempat. Hal ini juga bentuk pelestarian norma kesusilaan yang menempatkan tokoh agama dan adat pada posisi terhormat. Norma agama dengan menmpatkan sudut pandang yang tepat terkait dengan ritual budaya dan ritual agama khususnya yang berhubungan dengan sedekah laut. Pemda Bantul selaku pembina masyarakat mendukung dan mengakui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga selalu dilibatkan dalam kegiatan tradisi sedekah laut ini, dan selalu mempertahankan agar tradisi ini selalu ada. Peningkatan norma hukum juga terus dilakukan oleh pemerintah Bantul meski belum maksimal. Pemda Bantul belum mampu memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar norma hukum sehingga belum memberikan efek jera kepada yang melanggarnya. Pemda Bantul harus membuat aturan yang tegas dan memberikan sanksi serta bekerja sama dengan instansi lain yang punya kewenangan penegakan hukum. Norma-norma kebiasaan yang sudah ada dan berkembang juga tidak luput dari

perhatian pemerintah Bantul. Masyarakat Bantul juga sangat mengsakralkan hari jumat kliwon sehingga pada hari itu dilarang nelayan untuk pergi ke laut. Pada hari tersebut masyarakat melakukan yasinan atau berdoa bersama untuk meminta rezeki dan keselamatan. Norma kebiasaan yang lainnya adalah aturan pembagian hasil melaut dibagi dengan cara : pendapatan melaut dipotong dengan biaya operasional menjadi pendapatan bersih. Pendapatan bersih dipotong 7% untuk pendorong, 2% retribusi pemda Bantul dan 3% untuk Kas TPI. Hasil bersih 88% masih dibagi dua antara nelayan dan pemilik perahu. Norma kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat pesisir Bantul tetap dipertahankan dan didukung oleh pemda Bantul, sehingga tradisi maritim yang sudah ada tetap dapat dipertahankan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama agar norma yang sudah baik ini dapat dirasakan oleh generasi penerus.

Kesimpulan dan Saran

Masyarakat Bantul secara fisik tinggal dan berdiam dekat dengan laut namun secara kultural masih jauh dari

laut sehingga budaya maritim yang seharusnya melekat dengan masyarakat Bantul pada kenyataannya nilai dan norma yang berlaku secara sosiologis tidak merefleksikan masyarakat dengan budaya maritim.

Berdasarkan hasil penelitian ini setidaknya ada dua (dua) hal yang dapat dilakukan untuk membangun budaya maritim pada masyarakat Bantul; 1) meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul, dan 2) meningkatkan fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam pemanfaatan sumber daya maritim yang ada di Bantul sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik secara jasmani maupun rohani dan terbentuk aturan/norma yang mendukung pemanfaatan sumber daya maritim tersebut. Beberapa faktor utama yang menjadi fokus adalah ; a) meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Bantul baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sadar bahwa sumber daya maritim yang ada di Bantul belum

dimanfaatkan secara maksimal, b) meningkatkan sarana prasarana pendukung pemanfaatan sumber daya maritim seperti kapal dan alat tangkapnya, fasilitas kepelabuhan, standar minimal kelayakan destinasi wisata yang saat ini sangat dirasakan masih kurang, c) meningkatkan fasilitas permodalan wirausaha bagi pelaku pemanfaatan sumber daya maritime, d) membuat program-program cinta dan kepedulian masyarakat terhadap laut serta penanaman nilai maritim sejak usia dini yang lebih komprehensif, e) pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma, aturan maupun hukum yang berkenaan dengan laut.

Disamping masyarakat, Pemda Bantul juga harus memainkan peran dan fungsinya sebagai pendorong utama membangun kesadaran masyarakat Bantul memperkuat budaya maritim. beberapa langkah yang dapat dilakukan; a) Perlunya satuan kerja yang khusus menangani pemanfaatan sumber daya maritim sehingga lebih fokus dalam memanfaatkan sumber daya maritime, b) menyiapkan sumber daya manusia aparatur pemda yang memiliki kompetensi dan keterampilan sektor maritime, c) menyiapkan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana

pendukung serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program-program cinta laut dan penanaman nilai maritim sejak usia dini, d) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam pemanfaatan sumber daya maritime, membuat aturan-aturan yang mampu menjaga pelestarian lingkungan maritim dan pengaturan pemanfaatan sumber daya maritim serta mempertahankan norma maritim yang sudah ada

Sebagai rekomendasi dalam penelitian ini pada aspek metodologis perlunya penggunaan *soft system methodology* dan *software Nvivo* pada penelitian-penelitian kualitatif lainnya. Gap yang ditemukan dalam perbandingan model konseptual dengan realitas dapat dikembangkan menjadi penelitian lebih lanjut pada tema-tema peningkatan sumber daya manusia berkarakter maritim, sarana dan prasarana, anggaran yang cukup serta satuan kerja yang khusus menangani bidang maritim dan kerjasama antar instansi. Sedangkan pada tataran praktis. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemda Bantul untuk; a) perlu adanya dorongan terhadap Bupati Bantul

untuk memvalidasi satuan kerja yang khusus menangani sektor maritim sehingga pembangunan sektor maritim lebih fokus dan terarah, b) memprioritaskan pembangunan sektor maritim dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, c) merekrut pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian dan kompetensi di bidang maritim, memperbanyak sekolah vokasi kemaritiman untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang maritim, d) membuat program-program penanaman nilai kemaritiman seperti pengembangan kurikulum muatan lokal cinta laut dari usia dini hingga sekolah menengah atas dan memperbanyak event-event yang mendorong masyarakat datang ke laut, e) menyiapkan sarana dan prasarana melaut seperti pelabuhan, kapal serta alat tangkap dan pariwisata maritim serta mempertahankan budaya maritim yang sudah ada, f) meningkatkan kualitas kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, BUMN maupun Perguruan Tinggi dalam memanfaatkan sumber daya maritim yang ada di Bantul, g) melibatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam menjaga norma-norma maritim, h)

membuat aturan-aturan yang mendukung pemanfaatan sumber daya maritim dan mempertahankan aturan yang sudah baik serta memberian sanksi tegas sesuai norma yang ada terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran baik secara sosial maupun hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif dengan Menggunakan NVivo, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hardjosoekarto. S. (2012). Soft Systems Methodology. Jakarta: UI Press.
- Limbong, (2015), Poros Maritim, Edisi 1, Cetakan 1, PT Dharma Karya Karsa Utama, Jakarta.
- Nurseno. (2007). Soziologi 2, Solo: PT. Tiga serangkai Pustaka Mandiri.
- Octavian, A. dan Yulianto, B. (2014) Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim. Jakarta : Universitas Pertahanan.
- Reid, A. (2011) Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Wolters, O.W. (2011) Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & perniagaan Dunia Abad III - Abad I.Jakarta : Komunitas Bambu.
- Jurnal Ilmiah Dan Hasil Penelitian
- Budjantoro dan Wijayanti. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Menuju

Ekowisata Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Patihan Gadingsari Sanden Bantul. Jurnal Riset Daerah.

Istriyani. (2012) Pengaruh Persepsi Pada Pekerjaan, Persepsi Pada Pertumbuhan Ekonomi Kawasan dan Persepsi Pada Pelayanan Publik Terhadap Motivasi Kerja dan Partisipasi Nelayan Kapal di INKA MINA di Kabupaten Bantul.

Ramdhan, M. dan Arifin, T.(2013). Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia (Application of Geographic Information System for Assessment of Indonesia Marine Proportion), Jurnal BIG.

Dokumen

Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2017. Indonesia Poros Maritim Dunia. Presentasi

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul 2016-2021.

Internet

BIG, 2015. Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi. Dipetik Agustus 8, 2017, dari <http://bakosurtanal.go.id/assets/galleries/BedahBuku/GeoMaritimBookFinalLite.pdf>.

BPS. 2013. Laporan Hasil ST 2013 Nasional - Sensus Pertanian 2013 dipetik pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.30 dari

<https://st2013.bps.go.id/st2013esya/b ooklet/at0000.pdf>.

Kata Data. 2017. Angka Konsumsi Ikan Indonesia Masih Rendah. Dipetik pada tanggal 12 Agustus 2017 Pukul 13.00 dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/angka-konsumsi-ikan-indonesia-masih-rendah>.

Kuntarti, Sri Dewi. 2015. Indonesia As the World's Maritime Fulcrum: What Are The Beneficial And How To Achieve It?. Dipetik pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10.00 dari <https://sridewikuntarti.wordpress.com/2015/04/18/indonesia-as-the-worlds-maritime-axis-what-are-the-beneficial-and-how-to-achieve-it/>

Pushidrosal, Jumlah Terbaru Pulau Milik Indonesia Versi Survei Pushidrosal, dipetik tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.00. <https://www.liputan6.com/regional/read/2994344/jumlah-terbaru-pulau-milik-indonesia-versi-survei-pushidrosal>